

STRATEGI PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN AKADEMIK DI ERA NEW NORMAL UNTUK Mendukung KONSEP KAMPUS MERDEKA

Kalarensi Naibaho
Universitas Indonesia
clara@ui.ac.id clara.naibaho@gmail.com

Abstract

Academic libraries face great challenges in the new normal, because of the impact of the Covid 19 pandemic and changes in government policies in carrying out educational programs, which is implementing the concept of an Independent Campus. This study aims to explore the librarian's understanding of the concept of an independent campus, and strategies that can be applied in libraries in service development, as well as the obstacles that will be faced. The method used is qualitative. Data collection was carried out by interview. The informants consisted of 6 senior librarians, 4 from state universities and 2 from private universities. The results of data analysis show that librarians interpret the concept of an independent campus as collaboration between lecturers and students who require new management, and aim to strengthen the institution. The librarian considers that the concept of an independent campus will have an impact on changing the function of the library into one of the laboratories where students will do a lot of practice or internships. Meanwhile, the obstacles faced were related to policies related to access, facilities, collections and human resource development. Librarians must have human resources who understand the concept of interdisciplinarity and have the ability to supervise. To support the distance learning process in the new normal era, collection development is focused on e-resources and broad access from outside the campus. It is recommended that librarians make a library service management formula in order to apply the concept of an independent campus in higher education. This formulation can be used as a medium-term library development plan and integrated with the parent institution's policies.

Keywords: academic library, library services, e-learning, kampus merdeka, blended library

Abstrak

Perpustakaan akademik menghadapi tantangan besar di masa *new normal* saat ini. Tidak saja karena dampak dari pandemi covid 19 tapi juga karena perubahan kebijakan pemerintah dalam menjalankan program pendidikan, salah satunya adalah menerapkan konsep Kampus Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman pustakawan tentang konsep kampus merdeka, dan strategi yang dapat diterapkan di perpustakaan dalam pengembangan layanan, serta kendala yang akan dihadapi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Informan terdiri dari 6 orang pustakawan senior, 4 dari perguruan tinggi negeri dan 2 dari perguruan tinggi swasta. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pustakawan memaknai konsep kampus merdeka sebagai kolaborasi antara dosen dan mahasiswa yang memerlukan manajemen baru, dan bertujuan untuk penguatan lembaga. Pustakawan menilai bahwa konsep kampus merdeka akan berdampak pada perubahan fungsi perpustakaan menjadi salah satu laboratorium dimana mahasiswa akan banyak melakukan praktik atau magang. Sementara kendala yang dihadapi terkait dengan kebijakan terkait akses, sarana, koleksi, dan pengembangan SDM. Pustakawan harus memiliki SDM yang memahami konsep interdisiplinairitas dan memiliki kemampuan melakukan supervisi. Untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh di era *new normal*, pengembangan koleksi difokuskan pada *e-resources* dan akses yang luas dari luar kampus. Disarankan agar pustakawan membuat rumusan pengelolaan layanan perpustakaan dalam rangka menerapkan konsep kampus merdeka di perguruan tinggi. Rumusan tersebut dapat dijadikan rencana pengembangan perpustakaan jangka menengah dan diintegrasikan dengan kebijakan lembaga induk.

Kata Kunci: perpustakaan akademik, layanan, e-learning, kampus merdeka, perpustakaan campuran

LATAR BELAKANG

ASEAN memprediksi 40 tahun ke depan pendidikan tinggi akan menghadapi perubahan yang sangat cepat pada sektor pengelolaan teknologi dan informasi (revolusi industri), demografi, geopolitik, geoekonomi, dan sumber daya manusia. Perguruan Tinggi, mau tidak mau, harus beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tidak tergilas. Setiap negara merespon prediksi ini dengan berbagai kebijakan sesuai situasi negaranya masing-masing. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, melakukan berbagai gebrakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi. Salah satunya adalah konsep Kampus Merdeka, yang merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Kebijakan ini di-keluarkan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sebagai aset bangsa untuk mampu bersaing di era global. Program ini bertujuan untuk memberikan ‘kebebasan’ bagi perguruan tinggi dalam tata kelola organisasi serta ‘kemerdekaan’ bagi mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pemerintah menyadari bahwa dunia pendidikan tinggi telah memasuki era dimana informasi dan pengetahuan tersedia secara luas melalui jejaring Internet, dan tantangan utamanya adalah kesiapan Indonesia dalam meng-hadapi Global Megatrend 2045 dan implikasinya terhadap kehidupan ber-negara.

Ide kampus merdeka sebetulnya bukanlah konsep baru. Paradigma ‘merdeka belajar’ telah dilakukan oleh para ilmuan di era terbentuknya perguruan tinggi di tahun 1000-an masehi. Di konteks ini, ‘merdeka belajar’ bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan fundamental. Kebijakan Mendikbud direspon banyak kalangan

dengan reaksi yang beragam, khususnya dari kalangan akademik. Ada yang mendukung, tak sedikit pula yang mempertanyakan. Sebagaimana layaknya sebuah konsep atau kebijakan baru, tentu adalah wajar jika mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Namun terlepas dari respon masyarakat tentang konsep Kampus Merdeka, Perpustakaan sebagai unit pendukung utama di perguruan tinggi perlu menerjemahkan konsep ini dalam bentuk program atau layanan yang tepat. Bagaimanapun juga perpustakaan memiliki tugas pokok dan fungsi mendukung pelaksanaan dan pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Konsep Kampus Merdeka di era *new normal* semakin penting disikapi dengan jelas dan tepat agar penyelenggaraan pembelajaran dan penelitian tetap berjalan dengan baik sekalipun metode pembelajaran harus berubah total menjadi pembelajaran jarak jauh. Konsep e-learning menjadi makin diminati dan serius diterapkan. Dan salah satu unit penting dalam penyelenggaraan konsep e-learning tentu adalah perpustakaan sebagai penyedia sumber pembelajaran. Perpustakaan perlu membangun sinergi atau kolaborasi yang utuh dengan akademik, baik dari segi sistem layanan ataupun koleksi. Karena itu penting bagi pustakawan memahami makna dan tujuan dasar dari konsep ‘Kampus Merdeka’ ini agar dapat menerapkannya di perpustakaan dengan tepat.

Valverde-Berrocso, et al. (2020) mengatakan bahwa transformasi digital sistem pendidikan di semua tingkatan telah memungkinkan penggabungan yang baru dalam ekosistem belajar-mengajar yang disebut e-learning. Pandemi COVID-19 menyebabkan penutupan ruang kelas di seluruh dunia dan memaksa 1,5 miliar siswa dan 63 juta

pendidik memodifikasi praktik akademik tatap muka mereka dalam waktu singkat, menjadi bentuk virtual. Situasi ini tentu memiliki kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan menghadapi tantangan digitalisasi. Pelanggaran digital masih menjadi sebuah keniscayaan. Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2018, 84% dari penduduk negara anggota Uni Eropa memiliki akses ke Internet, dibandingkan dengan 66% di Amerika Latin dan 18% di negara kurang berkembang. Proses belajar mengajar sebagian besar didukung oleh materi digital dan komunikasi elektronik mulai dari penyediaan slide atau script dalam bentuk digital hingga lingkungan belajar yang rumit dan interaktif. Bidang pencarian informasi (IR) mendapatkan lebih banyak perhatian, dan permintaan untuk program akademik yang sesuai semakin meningkat, dan ini sangat terkait dengan perpustakaan (Henrich, et al., 2009).

COVID-19 telah menghadirkan tantangan besar bagi perpustakaan dan pustakawan. Kebijakan dan kebiasaan kerja berubah total sejak pandemic covid 19 melanda dunia. Layanan-layanan publik termasuk perpustakaan terpaksa ditutup dan pustakawan mengalihkan bentuk layanannya menjadi layanan online. Praktis sejak Maret 2020, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia menutup layanan tatap muka dan menggantinya dengan layanan virtual.

Menurut Stoloff (2007), pembelajaran jarak jauh (e-learning) sesungguhnya bukanlah konsep baru di lingkungan perguruan tinggi. Konsep ini telah lama dijalankan walaupun tidak secara utuh untuk semua mata kuliah. Layanan daring juga bukan sesuatu yang baru di perpustakaan akademik, khususnya bagi perpustakaan yang koleksinya didominasi oleh koleksi elektronik (e-

resources). Namun dengan adanya pandemic covid 19, perpustakaan harus mencari cara bagaimana menjalankan ke-bijakan menjaga jarak sosial di ruang publik yang terbuka untuk semua orang. Tantangan makin berat ketika banyak perpustakaan mulai menutup layanan fisik, dan berusaha mempertahankan sebanyak mungkin program dan layanan selama berada di masa karantina. Di tengah kondisi karantina, program pembelajaran bagi mahasiswa tetap berjalan dalam bentuk daring. Artinya layanan perpustakaan tetap diperlukan dan malah semakin mendesak karena mahasiswa tidak dapat berkunjung ke lembaga lain ketika memerlukan informasi tertentu. Mahasiswa akhirnya sangat mengandalkan bantuan pustakawan untuk memenuhi kebutuhan informasinya.

Makalah ini mengkaji pemahaman pustakawan tentang konsep 'Merdeka Belajar' dan bagaimana strategi pengembangan layanan perpustakaan akademik di era *new normal* untuk mendukung pelaksanaan konsep 'Kampus Merdeka'. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap hasil wawancara dari 6 orang informan terkait kebijakan Kampus Merdeka dan strategi implementasinya dalam pengelolaan perpustakaan. Informan penelitian terdiri dari 4 orang pustakawan dari Perguruan Tinggi Negeri dan 2 orang dari Perguruan Tinggi Swasta. Penelitian ini dilakukan di bulan Agustus – September 2020. Wawancara dilakukan secara virtual (chat dan video call) melalui aplikasi WhatsApp.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Kampus Merdeka

Penerapan Merdeka Belajar dalam konteks 'Kampus Merdeka' dilandasi oleh lima Peraturan Mendikbud (Permen-dikbud) yaitu Permendikbud No. 3 Tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Maha-siswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, dan Permen-dikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Konsep Kampus Merdeka menawarkan 4 pokok utama kebijakan, yaitu:

- a. Pembukaan program studi baru
- b. Sistem akreditasi perguruan tinggi
- c. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- d. Hak belajar tiga semester di luar program studi

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Namun, terdapat pengecualian yang berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling

cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun. Akreditasi A akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Kebijakan ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Kebijakan keempat adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil ataupun tidak mengambil SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Hal ini berlaku untuk semua program studi selain prodi kesehatan.

Penerapan konsep Kampus Merdeka (selanjutnya disebut KM dalam makalah ini) memerlukan terobosan dalam hal kebijakan dan pengelolaan kegiatan akademik. Mendikbud menjelaskan bahwa perguruan tinggi perlu melakukan kerja

sama dengan organisasi yang mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemendikbud juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Bentuk kegiatan “merdeka belajar” di luar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui berbagai program, antara lain:

- a. Magang, konsep latihan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen dan pembimbing industri.
- b. Proyek Desa, dimana mahasiswa berkesempatan untuk melaksanakan semester di luar perguruan tinggi dengan terlibat langsung di proyek-proyek pembangunan desa. Tentunya perguruan tinggi harus lebih dulu menjajaki desa-desa yang memang menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk ikut serta.
- c. Mengajar di sekolah, dimana mahasiswa dapat merasakan pengalaman menjadi guru di sekolah-sekolah menengah dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari perguruan tinggi.
- d. Pertukaran pelajar. Program ini memang telah dilaksanakan di beberapa tahun terakhir di berbagai perguruan tinggi baik nasional maupun inter-nasional. Program ini dapat dipakai untuk memenuhi satu semester di perguruan tinggi lain baik untuk pembelajaran maupun penelitian.
- e. Proyek independen dan kemanusiaan. Mahasiswa dapat mengikuti proyek-proyek independen di perusahaan ataupun kemanusiaan untuk memenuhi satu atau dua semester di luar perguruan tinggi.
- f. Wirausaha, selain menjadi target pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, satu atau dua semester untuk memulai

wirausaha dapat dilakukan di beberapa kegiatan perusahaan seperti pada Business Incubator, Science Park dan lain-lain.

Dengan demikian, tantangan utama pelaksanaan kampus merdeka adalah penyamaan konsepsi bahwa perguruan tinggi merupakan organisasi yang dinamis yang mengikuti perubahan zaman. Persamaan persepsi ini juga penting dilakukan di lingkungan internal kampus agar pencapaian tujuan Belajar Merdeka tercapai dengan baik. Semua unit pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi di kampus perlu dilibatkan agar memiliki sinergi dan orientasi yang sama.

Konsep e-learning

Aparicio et al. (2016) mengklaim bahwa konsep e-learning bukanlah istilah pertama yang digunakan dalam konseptualisasi penggunaan sistem komputerisasi untuk mengaktifkan atau memfasilitasi proses pembelajaran. Mereka mengidentifikasi 23 konsep yang termasuk dalam penggunaan komputer untuk tujuan pembelajaran (misalnya, pembelajaran online, pembelajaran virtual, pendidikan jarak jauh, *m-learning*, MOOC, sistem manajemen pembelajaran). E-learning seharusnya tidak rancu dengan konsep *blended learning*, yang didefinisikan sebagai integrasi yang efektif, bahkan fusi, pembelajaran tatap muka dan online tergantung pada kebutuhan dan tujuan Pendidikan.

Sangrà, et al. (2012) menemukan empat kategori umum definisi e-learning: (1) menggunakan teknologi untuk menyampaikan program pembelajaran dan pelatihan; (2) berorientasi pada sistem pengiriman program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan sarana elektronik; (3) ber-

orientasi pada komunikasi, dimana pembelajaran difasilitasi dengan penggunaan alat dan konten digital yang melibatkan beberapa bentuk interaktivitas, termasuk interaksi online antara pelajar dan guru atau rekan mereka; dan (4) berorientasi pada paradigma Pendidikan, yakni teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung siswa meningkatkan pembelajaran mereka. Rodrigues, et al. (2018) mendefinisikan e-learning sebagai sistem berbasis web yang inovatif berdasarkan teknologi digital dan bentuk materi pendidikan lainnya yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan siswa pembelajaran yang dipersonalisasi, berpusat pada peserta didik, terbuka, menyenangkan, dan interaktif untuk mendukung lingkungan dan meningkatkan proses pembelajaran. Garrison (2011) mengklaim *e-learning* adalah teknologi disruptif yang saat ini mengubah cara pendekatan dalam pembelajaran.

Jauh sebelumnya, Holmes dan Gardner (2006) menjelaskan bahwa sistem pembelajaran elektronik akan menjadi tren masa depan. Definisi e-learning sebagai "akses online ke sumber belajar, di mana saja dan kapan saja", jelas menunjukkan pentingnya kemampuan pembelajar untuk mengakses informasi yang dipersonalisasi ke pengetahuan komunitas. Jika ditilik dari sisi fondasi teoritis e-learning, Holmes dan Gardner berargumen bahwa untuk langkah selanjutnya diperlukan pengembangan konstruktivisme komunal. Hal ini dapat dimaknai sebagai "pendekatan pembelajaran dimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi mereka dengan orang lain, dan diberi kesempatan untuk menyumbangkan pengetahuan ini ke dasar pengetahuan komunal untuk kepentingan

peserta didik yang ada dan yang baru." Holmes dan Gardner melakukan banyak kajian dan diskusi tentang desain instruksional e-learning, pertimbangan penggunaan prasarana yang tepat untuk pembelajaran, mempelajari emansipasi melalui aksesibilitas yang lebih besar, dan potensi e-learning sebagai katalis perubahan untuk pengembangan pendidikan, pelajar, dan pendidik yang tak ada habisnya.

Menurut Stein et al. (2011) ada lima konsepsi e-learning (sebagai alat dan perlengkapan; sebagai fasilitator interaksi; sebagai pembelajaran; sebagai pengurangan jarak; dan sebagai usaha kolaboratif) dan empat konsepsi pengembangan profesional untuk e-learning (sebagai bentuk pelatihan; sebagai keterbukaan; sebagai kolaborasi; dan sebagai tujuan dan relevansi).

Bates menyatakan bahwa COVID-19 telah terbukti menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam sistem dan kebutuhan akan akses universal dan murah ke Internet untuk pendidikan. Kegagalan ini tidak dapat dikaitkan dengan e-learning itu sendiri, tetapi pada fakta bahwa potensi metode pengajaran e-learning tidak dapat lagi diremehkan dan dikeluarkan dari proyek pendidikan digital organisasi pendidikan. Masa depan e-learning harus dibangun di atas prinsip keterbukaan dan kesetaraan dengan pendidikan kompetensi digital. Dari sudut pandang ekonomi, industri e-learning telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Menurut statistik pasar e-learning di seluruh dunia akan bernilai lebih dari 243 miliar dolar pada tahun 2022. Ada tiga pilar e-learning berkelanjutan yakni: sumber daya manajemen (biaya e-learning), pencapaian pendidikan (ukuran prestasi siswa, tingkat retensi, perolehan keterampilan, dan pengembangan pribadi), dan

pengembangan profesional dan inovasi (strategi untuk beradaptasi dengan perubahan).

PEMBAHASAN

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang pustakawan senior dari 4 Perguruan Tinggi Negeri (UNPAD, UNAIR, UGM, UI) dan 2 Perguruan Tinggi Swasta (Universitas Soegiopranata dan PERBANAS). Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali pemahaman mereka tentang kampus merdeka. Proses analisis data diawali dengan melakukan transkrip wawancara, lalu melakukan proses coding yang terdiri dari 3 tahapan yakni: *open coding*, *axial coding*, *selective coding*.

Pemahaman Pustakawan Tentang Kampus Merdeka

Proses analisis kualitatif terhadap wawancara adalah: *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman pustakawan tentang konsep kampus merdeka dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pemahaman pustakawan tentang konsep 'Kampus Merdeka'

Infor man	Open Coding	Axial Coding
YS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagus untuk mahasiswa, namun jadi tantangan bagi lembaga yang ditunjuk karena ada tambahan pekerjaan yang rutin yaitu mensuper-<i>visi</i> mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supervisi mahasiswa
IP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terlalu berpengaruh ▪ Perlu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman interdisiplin aritas

	pemahaman interdisiplin aritas yang harus semakin tinggi	
MN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esensi pustakawan adalah partner PT dalam menjalankan Tri dharma ▪ Harus menerima konsep tersebut dengan mengubah pola manajemen dan layanan perpustakaan ke konsep merdeka belajar ▪ Tetap menjaga kualitas manajemen dan layanan perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partner akademik ▪ Perubahan manajemen layanan
EM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan kesempatan PT untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan dan muatan lokal masing-masing. ▪ Mengupdate data dan informasi untuk mendukung kebutuhan reakkreditasi. ▪ Memperkuat posisi kelembagaan perpustakaan. ▪ Memperluas jejaring perpustakaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesempatan bagi PT mengembangkan muatan lokal ▪ Posisi kelembagaan akan semakin kuat ▪ Jejaring perpustakaan
ESL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai pustakawan saya suka ▪ Perlu ada standar baku yang harus dipersiapkan terlebih dahulu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standar baku kampus merdeka
LW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa akan belajar di luar kampus lebih dari 30% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinergi antara dosen dan mahasiswa

	<p>melalui magang/praktik kerja lapangan ataupun melakukan penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa juga akan terlibat dalam proyek-proyek yang dilakukan dosen. ▪ Dosen juga melibatkan mahasiswa dalam proses <i>submit</i> artikel untuk diterbitkan di jurnal, sehingga mahasiswa dapat banyak belajar di sini. ▪ Dosen dan mahasiswa dapat bersinergi maka konsep tersebut dapat berjalan dengan baik. 	<p>a</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak praktik/magang, serta proyek bersama
--	--	--

Dari proses *open coding* dan *axial coding* hasil wawancara terhadap informan, pemahaman pustakawan tentang konsep ‘Kampus Merdeka’ atau KM dapat dikelompokkan dalam beberapa tema yakni:

Kolaborasi

- a. Partner akademik
- b. Sinergi antara dosen dan mahasiswa
- c. Banyak praktik/magang, serta proyek bersama
- d. Jejaring perpustakaan

Manajemen Baru

- a. Perubahan manajemen layanan
- b. Supervisi mahasiswa
- c. Pemahaman interdisiplinaritas

Penguatan Lembaga

- a. Kesempatan bagi PT mengembangkan muatan lokal

- b. Posisi kelembagaan akan semakin kuat
- c. Standar baku kampus merdeka

Axial coding di atas kemudian dikerucutkan menjadi *selective coding* sehingga pemahaman pustakawan mengenai konsep ‘Kampus Merdeka’ dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.
Selective coding ‘Pemahaman pustakawan mengenai konsep Kampus Merdeka



Pemahaman informan tentang konsep KM menghasilkan 3 poin penting yang yakni: kolaborasi dosen dan mahasiswa, manajemen baru, dan penguatan lembaga. Pustakawan juga menanggapi konsep KM secara positif, menerima konsep tersebut dan akan menyesuaikan pengelolaan perpustakaan sesuai kebutuhan konsep KM. Hal ini senada dengan pendapat Stein et al. (2011) yang mengatakan bahwa salah satu dari lima konsepsi e-learning adalah sebagai usaha kolaboratif, dalam hal ini antara dosen dan mahasiswa. Pembelajaran di perguruan tinggi memang merupakan kegiatan kolaborasi antara tenaga pendidik dan anak didik, dan dalam kondisi ini perpustakaan menjadi media atau sarana dimana kolaborasi ini dapat dijalankan dengan optimal, khususnya di era *new normal* yang mengandalkan komunikasi jarak jauh. Konsep ‘blended library’ dinilai tepat diterapkan oleh pustakawan dimana perlu dibangun sistem komunikasi dan layanan yang terintegrasi dengan sistem akademik. Pustakawan juga harus dapat bekerjasama dengan bagian akademik agar dapat mendukung kegiatan pembelajaran

jarak jauh dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas magang mahasiswa di perpustakaan sebagai bagian dari implementasi konsep KM

Strategi Pengembangan Layanan Perpustakaan Akademik dalam Konteks ‘Kampus Merdeka’

Pemahaman informan tentang konsep ‘Kampus Merdeka’ akan menjadi acuan dalam mengembangkan layanan perpustakaan untuk pengguna. Dari hasil wawancara tentang sikap atau strategi yang akan dilakukan pustakawan, dapat dirumuskan dalam tabel 1.2

Tabel 1.2 Strategi pengembangan layanan perpustakaan akademik dalam konteks ‘Kampus Merdeka’

Informan	Open Coding	Axial Coding
YS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyesuaikan konsep dan tipe layanan yang diberikan sesuai konsep tersebut. ▪ Mempersiapkan sumberdaya informasi yang bersifat multidisiplin yang memungkinkan diakses oleh seluruh bidang ilmu secara lengkap dan harus bisa diakses secara daring. ▪ Mekanisme layanan perlu diubah mengingat akan ada banyak kelompok magang di perpustakaan. ▪ Menyiapkan konsep dan SDM supervisi untuk mendampingi mahasiswa magang, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyesuaian konsep layanan ▪ Sumberdaya informasi multidisiplin ▪ Memperluas akses ▪ Meningkatkan kompetensi SDM di bidang supervisi

	yang kemungkinan berasal dari dalam dan luar kampus kita sendiri.	
IP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selalu melihat prodi apa yang baru dan sumber informasi apa yang dibutuhkan. ▪ Interdisiplinartitas dan meningkatnya pemahaman program studi. ▪ Penyediaan sumber informasi yang lengkap. ▪ <i>Learning styles</i> akan semakin berubah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Updateinformasi tentang prodi baru ▪ Pemahaman tentang interdisiplinartitas ▪ Sumber informasi lengkap ▪ Learning styles berubah
MN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berubah menyesuaikan konsep merdeka belajar dalam pemenuhan informasi dan membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar. ▪ Perubahan contents dan layanan perpustakaan ▪ Menyiapkan konten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar ▪ Mengubah konsep layanan ▪ Menyiapkan konten
EM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpustakaan harus berbenah menghadapi adanya perubahan konsep pembelajaran berbasis kampus merdeka. ▪ Perpustakaan harus memperkuat dan memperluas jaringan perpustakaan PT. ▪ Memperkuat sistem aplikasi perpustakaan digital. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merubah konsep layanan ▪ Memperkuat dan memperluas jaringan. ▪ Memperkuat sistem perpusatakaan digital
ESL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan informasi, bahan ajar yang relevan dan dapat diakses 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumberdaya informasi yang relevan.
LW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan koleksi untuk sumber belajar dengan format elektronik yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi elektronik Akses dari mana saja Pelatihan

	<p>dapat diakses dimana saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan layanan yang mendukung aktivitas mahasiswa di luar kampus, seperti menyediakan pelatihan daring. ▪ Perpustakaan dapat berperan sebagai laboratorium untuk mahasiswa melakukan praktek/magang 	<p>daring</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpustakaan sebagai laboratorium
--	---	---

Dari proses *open coding* dan *axial coding* hasil wawancara terhadap informan, strategi pengembangan layanan perpustakaan akademik dalam konteks ‘kampus merdeka’ dikelompokkan menjadi beberapa tema, yakni:

Konsep Layanan

- a. Penyesuaian konsep layanan
- b. Mengubah konsep layanan

Sumberdaya elektronik

- a. Sumberdaya informasi multidisiplin
- b. Koleksi elektronik
- c. Sumber informasi lengkap
- d. Sumberdaya informasi yang relevan.

Aksesabilitas

- a. Memperluas akses
- b. Memperkuat dan memperluas jaringan.
- c. Akses dari mana saja
- d. Memperkuat sistem perpustakaan digital

Kualitas SDM

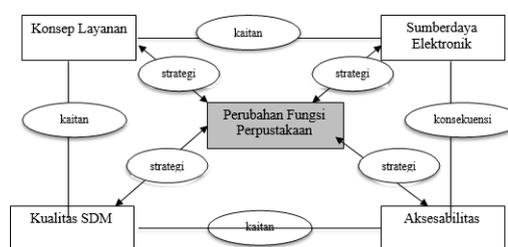
- a. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang supervise
- b. Pemahaman tentang interdisiplinartitas
- c. Update informasi tentang prodi baru

Perubahan Fungsi Perpustakaan

- a. Perpustakaan sebagai laboratorium
- b. Membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar
- c. Pelatihan daring
- d. *Learning styles* berubah

Dari tema yang dihasilkan oleh *axial coding* diatas, maka pada tahap *selective coding*, didapatkan hubungan seperti berikut:

Gambar 2. Selective coding ‘Strategi pengembangan layanan perpustakaan dalam konsep Kampus Merdeka’



Menurut informan, konsep kampus merdeka berdampak pada perubahan fungsi perpustakaan di berbagai aspek. Karena itu strategi yang perlu dikembangkan oleh pustakawan dalam menanggapi dan mendukung implementasi konsep kampus merdeka adalah dengan mengubah konsep layanan, meningkatkan kualitas SDM, melengkapi sumberdaya elektronik sebagai koleksi andalan dan memperluas akses kepada sivitas akademika. Salah satu aspek yang akan menjadi fokus pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan adalah *learning style* mahasiswa yang pasti akan berubah. Tidak hanya karena PJJ namun juga karena perkembangan teknologi informasi. Holmes dan Gardner telah mengingatkan ini dalam kajian mereka tentang potensi e-learning sebagai katalis perubahan untuk pengembangan pendidikan, pelajar, dan pendidik. Perubahan *learning styles* akan mengubah cara pendidik menjalankan kegiatan pembelajaran dan mengubah cara

pustakawan dalam mengelola layanan

Kendala dalam Penerapan Konsep 'Kampus Merdeka'.

Tabel 1.3

Infor man	Open Coding	Axial Coding
YS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendala utama adalah aksesibilitas konten informasi yang dimiliki, ▪ Faktor koleksinya, dari jumlah maupun jenisnya yang bisa mendukung kampus merdeka. ▪ Kaktor SDM yang memahami sekaligus mampu menjadi supervisor yang handal untuk mendampingi mahasiswa bila ada yang magang atau praktik kerja di perpustakaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan akses ▪ Kesesuaian jenis dan jumlah koleksi. ▪ SDM mampu jadi supervisor
IP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman dan kecepatan tanggap pustakawan yang kurang atas konsep itu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paham dan cepat tanggap
MN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan pola pikir dan perilaku pustakawan ▪ Sarana prasarana pendukung konsep merdeka belajar. ▪ Sosialisasi merdeka belajar di pustakawan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan pola pikir ▪ Sarana pendukung ▪ Sosialisasi
EM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendala yg dihadapi adalah: kebijakan, anggaran, SDM, sarana prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan ▪ Anggaran ▪ SDM

ESL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendalanya SDM dan dana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SDM ▪ Dana
LW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa perlu memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang seimbang, sebelum praktik ke lapangan. ▪ Hubungan baik dan berkesinambungan antara program studi dan tempat mahasiswa praktik/magang. ▪ Perlu program magang yang profesional (masuk ke kurikulum) yang melibatkan tempat praktik, sehingga tempat praktik tidak kesulitan dalam menentukan agenda kegiatan bagi mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soft skills dan hard skill mahasiswa ▪ Hubungan baik prodi dan tempat magang mahasiswa ▪ Kurikulum magang

Dari proses *open coding* dan *axial coding* hasil wawancara terhadap informan, kendala dalam penerapan konsep 'kampus merdeka' dikelompokkan menjadi beberapa tema, yakni:

Aksesabilitas

- a. Perluasan akses

Koleksi

- a. Kesesuaian jenis dan jumlah koleksi.

Kualitas SDM

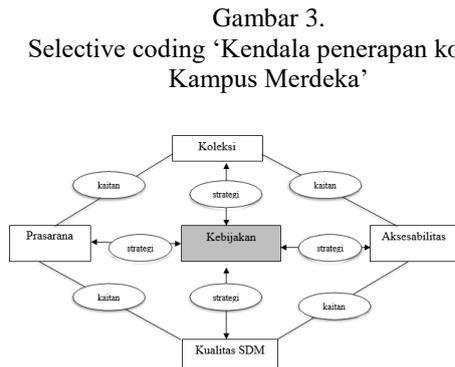
- a. SDM mampu jadi supervisor
- b. Paham dan cepat tanggap
- c. Perubahan pola pikir
- d. Soft skills dan hard skill mahasiswa
- e. Hubungan baik prodi dan tempat magang mahasiswa

Kebijakan

- a. Kurikulum magang
- b. Dana/Anggaran

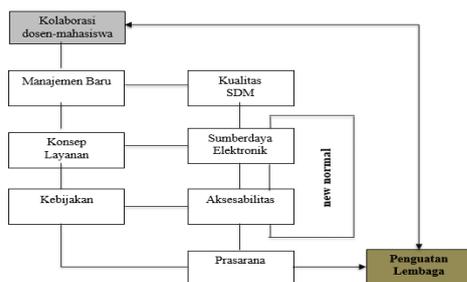
Sarana Prasarana

Dari tema yang dihasilkan oleh *axial coding* diatas, maka pada tahap *selective coding*, didapatkan hubungan seperti berikut:



Kendala yang akan dihadapi perpustakaan dalam penerapan konsep kampus merdeka terkait dengan kebijakan tentang pengembangan koleksi, pengadaan sarana prasarana, perluasan akses dan kualitas SDM yang memiliki kemampuan untuk melakukan supervisi dan memahami interdisiplinaritas. Jika dikaitkan dengan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di era new normal saat ini, konsep kampus merdeka dapat dikatakan berada dalam satu platform, yakni mengandalkan koleksi elektronik dan memerlukan akses yang luas.

Gambar 4.
Penerapan konsep kampus merdeka di perpustakaan akademik



Analisis kualitatif melalui proses *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* terhadap hasil wawancara 6 informan, dapat dirumuskan beberapa poin penting yang menjadi pokok pengembangan pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan terkait konsep kampus merdeka dan pembelajaran jarak jauh di era new normal:

- a. Manajemen: perpustakaan sebagai laboratorium (tempat mahasiswa magang)
- b. Kebijakan: pengembangan koleksi elektronik, akses dari luar kampus, sarana (jaringan yang mumpuni)
- c. SDM: kemampuan supervisi dan membimbing mahasiswa yang magang di perpustakaan, pemahaman tentang interdisiplinaritas, pengetahuan tentang program studi baru

PENUTUP

Pengelolaan perpustakaan akademik seiring dengan perkembangan pendidikan tinggi, baik dari segi kebijakan maupun strategi pembelajaran. Konsep kampus merdeka adalah salah satu kebijakan yang perlu dipahami oleh pustakawan sehingga dapat menerapkan kebijakan yang tepat dalam mengelola perpustakaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa pustakawan memaknai konsep kampus merdeka sebagai sebuah konsep kolaborasi yang berkaitan dengan manajemen baru pengelolaan perpustakaan yang pada akhirnya bertujuan untuk penguatan lembaga induk. Pustakawan juga menilai bahwa penting sekali memiliki strategi yang dapat menyesuaikan konsep kampus merdeka dengan perubahan fungsi perpustakaan. Dan penerapan ini akan mengalami kendala terkait kebijakan dalam hal pengembangan koleksi, aksesabilitas, kompetensi SDM yang mampu melakukan supervisi, dan menyediakan

sarana prasarana yang relavan.

Penerapan konsep kampus merdeka memerlukan konsekuensi jangka menengah dan jangka panjang, karena itu pustakawan perlu merumuskan rencana pengembangan yang tepat dan kebijakan yang akan diterapkan di perpustakaan

dalam rangka mendukung konsep kampus merdeka. Rencana pengembangan ini terkait dengan perubahan manajemen perpustakaan, kebijakan akses, penyediaan fasilitas, dan kompetensi pustakawan yang relavan.

REFERENSI

Agosto, D. E. (2006). Qualitative research for the information professional: A practical handbook. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 57(12), 1708-1709.

Aparicio, M., Bacao, F., & Oliveira, T. (2016). An e-learning theoretical framework. *An e-learning theoretical framework*, (1), 292-307.

Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1).

Garrison, D. R. (2011). *E-learning in the 21st century: A framework for research and practice*. Taylor & Francis

Henrich, A., & Sieber, S. (2009). Blended learning and pure e-learning concepts for information retrieval: experiences and future directions. *Information Retrieval*, 12(2), 117- 147.

Holmes, B., Gardner, J., & Gardner, J. N. (2006). *E-learning: Concepts and practice*. Sage. Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

Rodrigues, M. W., Isotani, S., & Zárata, L. E. (2018). Educational Data Mining: A review of evaluation process in the e-learning. *Telematics and Informatics*, 35(6), 1701-1717.

Sangrà, A., Vlachopoulos, D., & Cabrera, N. (2012). The Conceptual Framework of e-Learning: A View from Inside. *International Journal Of Learning*, 18(4).

Sicilia, M. A. (Ed.). (2006). *Competencies in Organizational E-Learning: Concepts and Tools: Concepts and Tools*. IGI Global.

Stein, S. J., Shephard, K., & Harris, I. (2011). Conceptions of e- learning and professional development for e- learning held by tertiary educators in New Zealand. *British Journal of Educational Technology*, 42(1), 145-165.

Stoloff, D. L. (2007). E-learning: Concepts and practice. *Choice*, 44(6), 1031. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/225723298?accountid=17242>

Valverde-Berrocoso, J., Garrido-Arroyo, M. D. C., Burgos-Videla, C., & Morales-Cevallos,

M. B. (2020). Trends in Educational Research about e-Learning: A Systematic Literature Review

(2009–2018). *Sustainability*, 12(12), 5153.

"Ini Rangkuman 4 Kebijakan Kampus Merdeka Mendikbud Nadiem",
<https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/11354331/ini-rangkuman-4-kebijakan-kampus-merdeka-mendikbud-nadiem?page=all>. 24 Januari 2020